

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Konflik merupakan hal yang terjadi dan tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan yang memang sudah terjadi dari zaman prasejarah hingga pada saat zaman globalisasi seperti sekarang ini. Dan salah satunya ialah Benua Afrika yang merupakan kawasan yang sering dilanda konflik dan melekat pandangan negatifnya dalam dunia internasional padahal Benua Afrika sendiri memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Menurut Ernie Regehr dalam *Ploughshares Armed Conflict Report 2000*, dari seluruh konflik yang terjadi diseluruh dunia, 40% berlangsung di Afrika dan 43% Negara-negara di Benua Afrika pernah mengalami peperangan. (Nsongrua 2003, hlm. 35). Salah satunya ialah Sudan. Sudan merupakan Negara Republik, letaknya di Afrika Timur. Sudan didominasi oleh masyarakat Afrika yakni masyarakat asli suku Afrika itu sendiri dan masyarakat Arab. Secara garis besar menurut CIA Fact Book, komposisi penduduk Sudan terdiri dari *Black African* (52 %) dan Arab (39 %), Beja (6 %), orang asing (2%) dan lainnya (1 %) (Maklumat Politik Sudan 2013 hlm. 1).

Sudan mempunyai luas tanah lebih dari 2,5 juta km² dan dibagi dalam tiga wilayah yaitu Utara, Selatan dan Barat. Sudan merupakan salah satu Negara yang mempunyai konflik internal besar di Benua Afrika itu sendiri. Salah satu kawasan di Afrika yang mencuri perhatian ialah Darfur. Darfur merupakan kawasan di sebelah barat Negara Sudan yang mana Darfur didiami oleh sebagian etnis Arab dan sebagian etnis Afrika. Hubungan kedua suku yang berbeda ini sering kali diwarnai konflik. Ada suatu kawasan di Darfur yang mempunyai tanah subur yaitu di kawasan gunung berapi Jebel Marra yang merupakan kawasan dimana penduduk Darfur awal tinggalnya berada ditempat ini dan dalam kepemimpinan Dinasti Daju. Menurut sejarah pun pada abad ke-14 Dinasti Daju digantikan oleh Dinasti Tunjur yang mana merupakan pembawa Islam masuk ke wilayah tersebut pula (Pruiner 2005, hlm.8). Pada abad ke-17, Kesultanan Fur didirikan oleh Dinasti Keyra dan membawa kejayaan pada masa itu terlebih karen lokasinya

yang strategis. Masih dalam masa kejayaannya dipimpin oleh Kesultanan Fur, Darfur menjadi pusat kegiatan ekonomi yang maju. Tetapi pada saat itu telah terjadi pula perdagangan budak, gading serta perhiasan-perhiasan dan bekerjasama dengan orang-orang Mediterania. Kesultanan Fur pun tetap melakukan penaklukan terhadap beberapa wilayah di Darfur. Kejayaan Dinasti Keyra yang dipimpin oleh Kesultanan Fur digoyahkan oleh pedagang budak terkenal yaitu Zubair Rahma sehingga membuat keadaan Darfur menjadi tak menentu, tidak adanya ketetapan hukum sehingga para oknum masyarakat bahkan tentara local turut mengintimidasi masyarakat. Pada saat itu pula Inggris masuk dan Darfur berada dibawah kekuasaan colonial Inggris dan memasukkannya menjadi bagian dari Sudan, membuat Sudan menjadi Negara terbesar di Afrika. Tetapi pemegang kekuasaan yang pada saat itu colonial Inggris tidak ada keinginan untuk membangun kawasan Darfur dan hanya untuk menjaga keamanan. Tidak ada investasi atau pembangunan-pembangunan dari colonial Inggris yang tidak tertarik membangun dan memajukan kawasan ini. Tidak dibangun pula oleh colonial Inggris fasilitas-fasilitas berupa sekolah, klinik, rumah sakit bersalin, kereta api bahkan tidak dibangunnya jalan-jalan di kota. Darfur diperlakukan sebagai kawasan terpencil.

Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing etnis ini memicu kecumburan social dan juga kesenjangan social yang mana pihak etnis Afrika merasa tersingkirkan ini berujung pada konflik yang panjang. Karena hal itulah banyak penduduk Darfur yang merasa tidak nyaman. Perpindahan secara paksa suku Arab dan imigran ke Negara Chad, yakni Negara tetangga ini lebih menambah konflik dalam *Fur-Arab War* yaitu bentrokan antar etnis di Darfur yang terjadi pada tahun 1987-1989. Awal mula konflik karena sumber daya alam yaitu tanah dan air yang sangat terbatas antara kaum Fur di Utara dan bertambah parah dengan campur tangan dari unsur-unsur dari kedua kelompok yang bertikai di Darfur bagian Utara. Propaganda yang dilakukan oleh media pun memicu pertikaian antara kaum Fur dan kaum Janjaweed (Darfur Rising: Sudan New, 2004). Sehingga dimana penduduk asli Darfur dipaksa untuk meninggalkan tanah yang merupakan tempat tinggal mereka. Penduduk Sudan pun melakukan *Internally Displaced Person*. Berdasarkan Konvensi tahun 1951 di Jenewa, *United*

Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) memberikan definisi tentang pengungsi adalah setiap orang yang berada di luar negara warga negaranya atau jika ia tidak memiliki warga negara, negara dimana dia bertempat tinggal sebelumnya, karena ia memiliki atau pernah memiliki rasa takut akan persekusi karena alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pendapat politik dan tidak dapat, atau karena suatu ketakutan, tidak bermaksud untuk mendapatkan dirinya perlindungan dari pemerintah negara kewarganegaraanya atau jika dia tidak memiliki kewarganegaraan, untuk kembali ke negara dimana dia pernah bertempat tinggal sebelumnya. *Internally Displace Persons (IDPs)* termasuk salah satu jenis pengungsi yaitu pengungsi yang keluar dari wilayah tertentu dan menempati wilayah lain tetapi masih dalam satu daerah kekuasaan satu negara. Pengungsi internal biasanya merupakan penduduk migran terpaksa akibat konflik bersenjata atau akibat dari situasi-situasi rawan lainnya (seperti tindak kekerasan, bencana alam, bencana akibat ulah manusia) yang tidak melintasi perbatasan negaranya.

Berawal dari konflik domestik, konflik Darfur ini menjadi permasalahan internasional hal ini disebabkan perkembangan konflik Darfur sendiri pun telah merambah ke permasalahan politik regional karena keamanan negara-negara tetangga turut terkena imbas, salah satunya Chad yang merupakan tetangga dari Negara Sudan.. Dalam catatan sejarah Sudan telah mengalami berkali-kali pergolakan sebagai dampak dari pergolakan ini bisa dikatakan konflik etnis yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mengenai stabilitas sosial antara etnis atau lebih, ekonomi, politik dan keamanan. (Memahami Seluk Beluk Konflik antar Etnis, 2012).

Karena pemerintah tidak bisa menangani atau bisa dikatakan adanya ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Sudan dengan mendukung Janjaweed. Dua kelompok bersenjata di Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) dan Justice and Equality Movement (JEM) adalah kedua kelompok yang merupakan pemberontak atas pemerintahan Sudan. Mereka menyerang fasilitas-fasilitas pemerintah dan menyerang warga sipil. Karena itulah pemerintah Sudan memfasilitasi etnis Arab (Janjaweed) untuk membela diri. Janjaweed terus berkembang maju seiring berita bahwa dana yang mengucur dari pemerintah

Sudan sendiri untuk kelompok Janjaweed tersebut. Hal ini pula yang membuat munculnya kelompok-kelompok pemberontak di Darfur untuk melawan Janjaweed itu sendiri. Keadaan seperti ini membuat masyarakat di Darfur kian memprihatinkan inilah yang kemudian menjadi motivasi utama SLM/A dan JEM untuk kemudian melakukan penyerangan terhadap pangkalan udara pemerintah Sudan di El Fasher, ibu kota Darfur Utara pada tanggal 25 April 2003 (Conflict Analysis, 2012).

Jelas dengan penyerangan yang terjadi oleh para pemberontak yaitu SLM/A dan JEM menyebabkan banyak korban dan dianggap sebagai krisis kemanusiaan karena data korban jiwa yang diakibatkan karena konflik ini. Pada pertengahan Oktober 2004 tercatat kira-kira sekitar 1,8 juta penduduk harus meninggalkan tempat tinggalnya karena konflik di daerah tersebut. Sekitar 1,6 juta dari korban tersebut pindah ke wilayah lain di Sudan dan sekitar 200.000 lainnya mengungsi ke Negara tetangga terdekat yaitu Chad. (Dagne, 2004). Dan menurut WHO, pada bulan Oktober 2004 memperkirakan sekitar 70.000 dari pengungsi meninggal dalam enam bulan terakhir akibat kekurangan gizi dan wabah penyakit yang merupakan efek dari konflik Darfur (Strauss, 2005). Jadi bisa dibayangkan dalam tahun 2004 ada sekitar 3,7 juta korban akibat konflik Darfur ini.

Dalam kawasan regional, adapun cara-cara yang dilakukan oleh negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Negara yang mempunyai konflik, dalam hal ini Sudan umumnya melakukan melalui organisasi regional. Organisasi regional sendiri pada umumnya mempunyai keanggotaan yang terbatas pada suatu kawasan tertentu saja. Walaupun keanggotaannya terbatas tetapi adapun kepentingan yang dimiliki organisasi regional bisa dikatakan luas.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan organisasi regional tersebut mempunyai perannya sendiri dalam kawasan tersebut. Adapun keuntungan yang didapat oleh organisasi regional dalam menyelesaikan konflik, secara geografis organisasi regional lebih mengenal aktor konflik, secara budaya organisasi regional lebih memahami bagaimana budaya di kawasan tersebut. Hal itulah yang membuat organisasi regional lebih mempunyai wewenang untuk mengatasi konflik terlebih dahulu sebelum keterlibatan PBB. Dalam hal ini organisasi regionalnya ialah Uni Afrika. Uni Afrika terbentuk pada 9 Juli 2002 dan

merupakan organisasi antar-pemerintah yang bertujuan menekankan pada hal demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kontinen, dan salah satu dari prinsip-prinsipnya adalah resolusi konflik untuk perdamaian diantara negara-negara anggota dilakukan dengan cara yang terbaik dan diputuskan oleh Dewan Majelis. Uni Afrika sendiri merupakan organisasi antar-pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian.

Faktor-faktor penyebab konflik di Afrika sangat beragam sebagaimana yang dijelaskan oleh William Zartman, terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena konflik di Afrika, antara lain: (Mathew, 2000 hlm.81-103)

- a. Gagalnya proses integrasi dalam pembentukan Negara bangsa.
- b. Warisan masa kolonia dan proses dekolonisasi yang bermasalah terutama pada masalah perbatasan.
- c. Gerakan kemerdekaan atau revolusi social yang dipengaruhi oleh Perang Dingin.
- d. Konflik akibat ketegangan antaretnik.
- e. Konflik akibat ketegangan sosio-ekonomi dan politik.
- f. Munculnya fundamentalisme agama.

Ada dua alasan yang membuat penulis berpikir bahwa Uni Afrika dipilih sebagai organisasi yang dapat menyelesaikan konflik Darfur. Pertama, Piagam PBB mendorong regionalisme sebagai pelengkap dari organisasi internasional (Weigall, 2002). Tercantum pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 52, bahwasannya penyelesaian konflik pada suatu kawasan diharuskan organisasi kawasan tersebut yang menanganinya terlebih dahulu. Kedua, Sudan terdiri dari delapan puluh suku dan kelompok-kelompok etnis maka dari itu, kenapa tidak sebaiknya konflik Darfur dapat terselesaikan bila mediator memahami latar belakang kehidupan sosial budaya suku-suku yang tinggal di kawasan tersebut. Atas dasar pertimbangan kedua alasan tersebut maka dipilihlah Uni Afrika sebagai organisasi kawasan di Afrika dan juga sebagai wadah perhimpunan negara-negara Afrika merasa perlu adanya peran Uni Afrika sebagai organisasi regional untuk turut campur menyelesaikan konflik Darfur. Dan dijelaskan pada Piagam Uni Afrika menyatakan bahwa Uni Afrika berhak

mengintervensi negara anggotanya berdasarkan keputusan majelis setelah terjadi genosida, pelanggaran kemanusiaan dan kejahatan perang.

Terdapat lima kategori tindakan yang dilakukan oleh Negara-negara tetangga terhadap konflik internal di suatu Negara, yaitu: (Michael E. Brown, 1996 hlm. 591-599):

- a. Intervensi kemanusiaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik internal tersebut.
- b. Intervensi defensive yang ditujukan untuk mengakhiri permasalahan lintas batas mencegah peperangan meluas ke wilayahnya dan untuk mengakhiri konflik.
- c. Intervensi protektif untuk melindungi atau membantu kelompok etnik tertentu di Negara yang terlibat konflik karena kedekatan dengan kelompok etnik yang ada di wilayahnya.
- d. Intervensi oportunistik untuk mengeksploitasi konflik di Negara tetangganya untuk kepentingan politik, ekonomi dan militer serta meningkatkan posisi regionalnya.
- e. Invasi oportunistik dengan memanfaatkan kelemahan akibat konflik internal untuk melakukan penyerangan militer.

Tidak semua aktor eksternal mampu berperan secara efektif untuk membantu penyelesaian suatu konflik internal. Adapun hal yang harus dimiliki aktor eksternal untuk turut membantu menyelesaikan konflik ialah mempunyai niat dan itikad baik untuk mendamaikan actor-aktor dalam konflik tersebut sekalipun actor eksternal ini harus berhadapan dengan pemerintah yang bersangkutan, memiliki kapabilitas militer dan pengaruh politik yang kuat di level regional maupun internasional sehingga dapat mencegah masuknya pihak lain, serta mampu menjadi mediator untuk mencegah disintegrasi di suatu Negara tanpa mengesampingkan kepentingan actor non-negara. Mediasi merupakan salah satu bentuk keterlibatan aktor eksternal dalam suatu konflik yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua pihak. Mediasi dapat dilakukan individu, Negara, organisasi internasional maupun organisasi *non-governmental*.

Respon Uni Afrika terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) No. 1564, PBB pun secara langsung menunjuk Uni Afrika untuk melakukan penyelesaian konflik Darfur lewat penggunaan pasukan dari PBB untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah konflik Darfur tersebut. Kemudian dalam bimbingan bersama DK PBB, Uni Afrika sendiri membentuk sebuah badan untuk menanggulangi konflik Darfur yang dinamakan African Union Mission In Sudan (AMIS). Jika upaya kesepakatan damai tercapai, upaya selanjutnya disebut sebagai pembangunan perdamaian pasca konflik. Pada tahapan ini butir-butir kesepakatan damai diimplementasikan dalam kebijakan dan tindakan yang kongkrit. Dua langkah penting perlu dilakukan yaitu rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai dan pemulihan kondisi wilayah konflik melalui kegiatan pembangunan struktur ekonomi dan social secara menyeluruh. Tahapan ini memakan waktu paling lama karena memang diarahkan untuk mencapai kondisi damai yang sebenarnya sehingga konflik tidak terulang kembali.

I.2 Rumusan Permasalahan

Adapun pertanyaan penelitian yang muncul pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Upaya Uni Afrika dalam mengatasi Konflik Darfur 2003-2006?”

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja upaya Uni Afrika dalam memainkan peranannya sebagai organisasi regional di kawasan Benua Afrika dalam konflik Darfur.

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Memberikan wawasan kepada penulis terkait dengan peranan organisasi kawasan untuk menyelesaikan konflik di kawasannya.
- b. Meningkatkan kemampuan analisis penulis terhadap penyelesaian suatu konflik kawasan.

I.5 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa hasil tulisan yang disusun dan dapat dijadikan acuan yaitu mengetahui kepentingan pihak pemberontak penelitian ini pun turut menggunakan buku Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika oleh Abdul Hadi Adnan dijelaskan bahwa peran negara-negara untuk meminimalisir konflik Darfur apalagi terkait dengan politik luar negeri Sudan yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan dengan para Negara tetangga dan dengan prinsip saling menghormati kedaulatan dan non-intervensi, meneruskan upaya untuk melepaskan diri dari keterisolasian dalam dunia internasional yang masih menghambat kiprah politik Sudan. Upaya mediasi Uni Afrika di Abuja akhir April 2006 mengenai *security, power sharing and wealth sharing* sehingga menghasilkan pola yang mediasi lakukan mengacu pada masalah Sudan. Adapun dua pasal yang krusial yang dituntut SLM/A: (Adnan, 2007 hlm.129)

- a. Pelucutan senjata kelompok Janjaweed, sebelum hal yang sama dikenakan pada dua kelompok pemberontak.
- b. Pengintegrasian sebagai pasukan pemberontak ke dalam angkatan bersenjata Sudan.

Uni Afrika dijelaskan dalam buku ini menyelesaikan perundingan di Abuja, Nigeria. PBB selanjutnya lebih banyak berperan, meskipun timbul kesulitan karena Pemerintah Sudan semula menolak kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB di Darfur, apalagi jika pasukan itu berasal dari anggota *North Atlantic Treaty Organization*.

Dalam jurnal dengan judul *Darfur and The Genocide Debate* oleh Scott Straus dijelaskan mengenai korban konflik Darfur dan bagaimana dunia internasional meresponnya. Sehingga bisa disimpulkan bagaimana Uni Afrika harus berperan dalam konflik Darfur karena sudah banyaknya korban. Secara besar-besaran konflik Darfur sudah sangat banyak menelan korban jiwa dan para korban itu sendiri ialah bangsa Afrika yang merupakan suku asli di Darfur. Akar dari konflik tersebut mengarah pada pemerintah Sudan itu sendiri. Pertumpahan darah di Darfur pun dijelaskan dalam jurnal ini menyita banyak perhatian, tetapi perhatian yang ada lebih kepada genosida yang terjadi di Darfur. Dan dijelaskan dalam jurnal tersebut bahwasannya pada Juli 2004, Amerika Serikat mengesahkan

adanya genosida di Darfur. Untuk itu PBB selaku organisasi internasional ditugaskan untuk mengawasi Sudan dan mengutus Uni Afrika untuk mengirim pasukan perdamaian.

Tim Youngs dalam penelitiannya yang berjudul *Sudan: Conflict in Darfur* mencoba menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya konflik serta mengidentifikasi peran actor-aktor internasional dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Menurut Tim Young, konflik di Darfur sesungguhnya lebih merupakan konflik yang berdimensi ekonomi yang dipicu oleh perbuatan akses sumber daya. Konflik yang berskalasi pada tahun 2003 memiliki akar pada konflik-konflik tradisional yang telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan kemudian diperburuk dengan kebijakan pemerintah Sudan yang melakukan militerisasi terhadap salah satu kelompok etnik di Darfur. Penelitian lainnya dilakukan oleh Lansana Gberie yang berjudul *The Darfur Crisis: A Test Case for Humanitarian Intervention* yang menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur dan lambatnya respon internasional untuk membantu krisis tersebut. Menurutnya, kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Darfur memerlukan adanya intervensi kemanusiaan yang cepat dari actor-aktor eksternal-eksternal.

I.6 Kerangka Teori

Sesuai dengan judul yang tertera pada penelitian ini, maka dari itu penulis menggunakan beberapa teori yaitu teori organisasi internasional dan konsep regionalisme.

I.6.1 Teori Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu Negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*,

Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Peranan organisasi internasional menurut Clive Archer yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu: (Perwita dan Yani, 2005 hlm.95)

- a. Sebagai instrument. Organisasi internasional digunakan oleh Negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
- b. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.
- c. Sebagai actor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet adalah: (Perwita dan Yani, 2006, hlm.97)

- a. *To provide the means of cooperation among states in areas which cooperation provides advantages for all or a large number of nations* (menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa).
- b. *To provide multiple channels of communication among governments so that areas of accommodation may be explored and easy acces will be available when problems arise* (menyediakan banyak saluran-saluran

komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan).

Keterkaitan organisasi internasional dalam konflik Darfur pun diharuskan, peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena kerberhasilan, tindakan dan kebijakan dari organisasi internasional dapat memecahkan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi suatu negara dan dapat menjadi sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama yang sudah disepakati tersebut. Dijelaskan sebelumnya ketidakadilan pemerintah Sudan membuat pemberontak semakin menjadi sehingga banyak menimbulkan korban maka dari itu peran organisasi internasional sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Darfur ini. Uni Afrika sebagai organisasi regional terkuat di kawasan Afrika mempunyai wewenang dan pengaruh kuat terhadap Negara-negara anggota Uni Afrika. Bisa dilihat dari tiga kategori organisasi internasional tersebut diharapkan organisasi regional dalam hal ini Uni Afrika dapat menjadi mediator yang baik.

I.6.1.1 Konsep Peranan dalam Organisasi Internasional

Peranan dapat digambarkan sebagai individu atau kelompok yang mengaplikasikan tindakan atas dasar status kedudukan yang dimiliki. Pengertian Peranan adalah sebagai berikut :

‘Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan’. (Soekanto, 2002 hlm.243)

Adapun juga pengertian peranan adalah peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Peran dari struktur tunggal, maupun berusun, ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peran tadi. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, maka ia telah menjalankan suatu peran (Soekanto, 2001 hlm.268). Munculnya suatu harapan bisa ditelaah dari dua sumber. Pertama, yang dimiliki orang lain terhadap faktor politik. Kedua, harapan juga bisa muncul dari cara pemegang peran menafsirkan peranan yang

dipegangnya yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kegunaan teori peranan ini, sebagai alat analisis yang paling penting adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik.

Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*)” (Perwita dan Yani, 2005 hlm.30). Jadi peran dapat dipahami sebagai fungsi yang dimainkan actor dalam suatu arena. Dalam skripsi ini, aktor yang dimaksud Uni Afrika sebagai organisasi internasional, sedangkan arena yang dimaksud ialah upaya Uni Afrika dalam mengatasi konflik Darfur ini.

I.6.2 Konsep Regionalisme

Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu. Kedekatan geografis menimbulkan masyarakat yang ingin menyatu dalam arti ingin bersama-sama membentuk suatu tujuan bersama untuk kepentingan kawasan tersebut. Meskipun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menyatukan negara dalam satu kawasan. Hettne dan Soderbaun mengemukakan bahwa kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama. (Hettne & Soderbaun 2002, hlm.39). Menurut Mansbaach pun, kawasan merupakan pengelompokan regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaannya dalam organisasi internasional. (Nuraeni dkk. 2010 hlm.1)

Dalam buku Regionalisme oleh Nuraeni S, Deasy Silvy dan Arifin Sudirman dijelaskan bahwa kerjasama regional mempunyai macam-macam bentuk, yaitu kerjasama fungsional, kerjasama ekonomi, kerjasama politik, kerjasama dalam permasalahan luar negeri. Dalam macam-macam bentuk kerjasama regional tersebut tidak dibutuhkan hubungan diantara wilayah-wilayah kerjasama ini dan masing-masing kerjasama regional memiliki konsekuensi

identitas intersional tersendiri bagi anggota yang ikut dalam kerjasama regional tersebut. Bagi kaum neo-realis, regionalism sama saja dengan aliansi. Aliansi merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam hubungan internasional. Para actor saling melakukan bargaining satu sama lain, melakukan koordinasi strategi-strategi, dan berupaya mencari kesepakatan mengenai tujuan-tujuan bersama. Sering kali aliansi diresmikan melalui perjanjian-perjanjian yang melakukan spesifikasi dalam perilaku kolektif bersama dan obligasi dari pihak-pihak yang ikut terlibat. (Nuraeni dkk. 2010 hlm. 41)

Uni Afrika mempunyai tujuan untuk menyatukan seluruh negara di kawasan Afrika. Uni Afrika merupakan bentuk baru dari Organization Of African Unity (OAU) yang didirikan pada tahun 25 Mei 1963 di Addis Ababa. Secara umum, tujuan Uni Afrika berbeda dan lebih komprehensif dibandingkan OAU. OAU telah melakukan misi-misinya dan adanya penambahan protocol Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika yang terbentuk pada 9 Juli 2002. Pembentukan ini dengan maksud untuk menjaga, mengatur dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara-negara anggota. (The History and Development Of The African Union 2003). Fungsi dari Uni Afrika ini termasuk juga menjalankan tujuan-tujuan promosi perdamaian, keamanan dan stabilitas politik di kawasan Afrika. Hal tersebut juga merupakan mandat dari organisasi internasional PBB yang terdapat dalam pasal 54 pada Piagam PBB yang menyatakan bahwa Dewan Keamanan senantiasa akan diberitahu selengkapnya mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan atau sedang dipertimbangkan di dalam rangka pengaturan-pengaturan regional oleh badan-badan regional untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan. (Nuraeni dkk. 2010 hlm. 32-33). Uni Afrika sebagai suatu organisasi regional yang kuat di Afrika memiliki pengaruh yang kuat pula sebagai suatu wadah yang mengorganisir negara-negara anggotanya. Penelitian ini berdasarkan pada pasal 52 Piagam PBB, kewenangan organisasi regional untuk menyelesaikan konflik.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

- a. Sesuai dengan pasal 52 Piagam PBB- bahwasannya organisasi regional mempunyai hak untuk menyelesaikan konflik dalam regional terlebih dahulu.
- b. Pemerintah secara sengaja mendanai suku Arab di Darfur yaitu *Janjaweed* sehingga menimbulkan kecumburan social bagi para pemberontak.
- c. Berakhirnya AMIS di Darfur digantikan oleh *United Nations Mission In Sudan (UNMIS)*.

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, karena penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana upaya Uni Afrika dalam mengatasi konflik Darfur. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Bodan dan Taylor (Moleong 2004, hlm. 3) metode kualitatif merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

I.9.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang biasa didapat melalui literatur-literatur dari hasil riset seperti buku, artikel, jurnal dan laporan-laporan resmi dari lembaga pemerintahan, dokumen, surat dan pidato.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan pencarian internet. Data yang ada digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengidentifikasi gagasan maupun ide-ide yang ada didalam literatur tersebut untuk dijadikan suatu argument untuk memperkuat penelitian.

I.9.4 Teknik Analisa Data

Data-data yang ada dianalisa menggunakan teori sebagai panduan untuk menginterpretasikan data-data yang telah ada. Kemudian data-data dan fakta yang ada disaring lagi untuk mendapatkan data yang bisa digunakan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka dasar bagi keseluruhan proses penelitian. Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, operasionalisasi konsep, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM SUDAN DAN KONFLIK DARFUR

Bab ini dimaksudkan untuk memberikan suatu deskripsi umum mengenai subjek penelitian. Bab kedua akan membahas pembahasan profil Negara Sudan, actor-aktor internal yang terlibat dalam Konflik Darfur serta

penjelasan mengenai Uni Afrika, dan faktor – faktor Uni Afrika keterlibatan Uni Afrika.

BAB III PERAN UNI AFRIKA DI KONFLIK DARFUR

Bab ketiga akan membahas peran Uni Afrika di Darfur dalam konteks organisasi dan kontribusi organisasi regional tersebut. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi Uni Afrika dalam melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas Konflik Darfur dan hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas kesimpulan pokok terhadap keseluruhan pembahasan pada bagian sebelumnya.

